

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.
- Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 262
- Antonie A.G Peters, Main Current In Criminal Law Theorie, In Criminal Law In Action, Gouda Quint by Arnhem, 1986, hlm 33, dikutip dari Kamariah, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, 1994, hlm 43
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1999.
- Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Indonesia Mineral dan Batubara, 2018 Penerbit UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Cetakan I hal 51.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Firoz Gaffar dan Irdal Kasim. 1990. *Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan dari Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia): hasil studi perkembangan hukum proyek bank*
- Firdaus Arifin Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Firdaus Arifin, Pagaruyuang Law Jurnal, Juli 2019.
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm, 13
- Hullsman, Sebagaimana Dikutip Roesland Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 87
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- JJ.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, *Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- J.E Sahetapy, hukum pidana, liberty Yogyakarta, 1996, hlm 67
- Joan Kuyek, 2005, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1.
- John Rawls, Teori Keadilan, *Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

- Koentjaraningrat, Pergeseran Nilai – Nilai Budaya Dalam Masa Transisi, Dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, Bina Cipta Jakarta, Tanpa Tahun, hlm 25.
- Lamintang, *Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123, 2013.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1, 2014.
- Manulang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm. 57
- Marfuatul Latifah. 2015. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset, P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi-GP Press Group, Jakarta Selatan, 2013.
- Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 37
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1
- Muhamad Sadli Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Kencana, hlm 216, 2017.
- Muladi, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 256
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2013.
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 11, 2014.
- Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2019.
- Satjipto Raharjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Cetakan ke-14, Bantul-Yogyakarta, 2019.
- Syaiful Bahri, dkk, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014.
- Syaiful Bahri, *Pidana Denda, Dinamika Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Total Media-UMJ Press, Yogyakarta, 2016.
- R. Wihono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Padmo Wahjono, *Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakatra Bersama Firma Wijaya Dan Yayasan Tritura 66, hlm 36 1989.
- Rusdi Effendi, *Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional, Dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Bina Cipta 1986, hlm 64-65
- Ramelan, et. al. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Pusat

- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta
- Ruslan Saleh Mengutip Antonie A. G Peters, *Asas Dalam Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 28
- Riduan Syhrani, *Rangkuman Inti sari ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23
- Sri Hajati, Agus Sukarmadji, Sri Winarsi, Oemar Moechthar, 2021, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 3.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Oleh Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini Sampai Dengan Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, Hlm1
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, Suatu Pengantar, Cetakan Pertama Jakarta, Ghalia Indonesia, 198, hlm 62
- Soedarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 31
- Suparman Usman. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Teguh Sulistia, Ariya Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.
- Ter Haar, 1991, *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, Soebakti Poes Ponoto Jakarta, Pradnyaparamita hlm, 63
- Yopie Morya Imanuel Patrio, 2012, *Diskresi Pejabat Public dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, hlm. 88.
- Yunus Husein. 2010. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*. diakses pada 15 Oktober 2022.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023).
- Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Laksana, Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Laksana, Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang tentang Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN. No. 32 Tahun 2006, TLN. 4620.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

PPID PPATK, Naskah Akademis Undang-Undang Perampasan Aset, lihat dalam [https://ppid.ppatk.go.id › uploads › 2020/08 › 4](https://ppid.ppatk.go.id/uploads/2020/08/4) diakses tanggal 9 Juni 2024.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000.

United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003.

Criminal Law of The People's Republic of China.

International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur hal sama.

Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, Penggeledahan, Penyitaan, dan Perampasan Hasil dari Kejahatan (ETS No.141).

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional dan Terorganisir. 2000. www.unodc.org, diakses pada 15 Oktober 2022.

INTERPOL. 2017. *Stolen asset recovery fact sheet*. diakses tanggal 24 Desember 2023.

RUU Perampasan Aset Berantas TPPU. <http://www.Tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/413131/ruuperampasan-aset-berantas-tppu>. diakses tanggal 20 Maret 2024.

Indonesia Corruption Watch. 2023. RUU Perampasan Aset, Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan. <https://www.antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan> diakses 14 Maret 2024

SUMBER INTERNET

Peraturan (UE) 2018/1805 tentang *Saling pengakuan atas perintah pembekuan dan penyitaan*, <https://eur-lex.europa.eu> diakses pada 15 Oktober 2022.

Tempo.com. *Buron Kasus Korupsi, Ada yang Kabur Selama 28 Tahun*. <https://nasional.tempo.co/read/1501686/5> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika (1988), www.unodc.org, diakses pada 15 Oktober 2022.

The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation, <https://rm.coe.int/the-use-of-non-conviction-based-seizure-and-confiscation-2020/1680a0b9d3>, diakses pada 15 Oktober 2022.

- Konvensi UNCAC 2003 Diakses dari http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7_06.htm, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- OECD. 2014. *Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD responses* diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, 2019, Mutual recognition of non-conviction-based freezing orders and confiscation judgments, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Bright Line Law. 2020. *The use of non-conviction based seizure and confiscation*. Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- United Nations. 2021. Procedures allowing the confiscation of proceeds of corruption without a criminal conviction (CAC/COSP/WG.2/2021/4). Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- United Nations. 2021b. Procedures allowing the confiscation of proceeds of corruption without a criminal conviction (CAC/COSP/WG.2/2021/4). Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- United Nations. 2021a. Implementation of chapter V (Asset recovery) of the United Nations Convention Against Corruption (CAC/COSP/IRG/2021/7). Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Impact study on civil forfeiture. 2013. *Publisher Council of Europe Office in Belgrade Španski boraca* 3, 11070 Belgrade, lihat dalam <https://rm.coe.int/impact-study-on-civil-forfeiture-en/1680782955>. diakses tanggal 20 Desember 2022.
- <https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution>. Diakses tanggal 13 Mei 2023. diakses tanggal 20 Januari 2023.
- <https://www.jstor.org/stable/1122051><https://www.jstor.org/stable/1122051https://www.jstor.org/stable/1122051https://www.jstor.org/stable/1122051>. Diakses tanggal 13 Januari 2023.
- <https://www.sfo.gov.uk/2017/01/17/sfo-completes-497-25m-deferred-prosecution-agreement-rolls-royce-plc/> diakses tanggal 24 Juli 2023.
- The Netherlands Financial Intelligence Unit (FIU-the Netherlands), lihat <https://www.fiu-nederland.nl/en/about-the-fiu> diakses tanggal 24 Juli 2023.
- http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/wa/consol_act/cpca2000333/Criminal_Property_Confiscation_Act_2000_-_sect_144 diakses 20 Februari 2024.

JURNAL

- Anti Corruption Resource Center Team, Legal Responses to Corruption dalam www.u4.no/themes/uncac/report.cfm*. Diakses tanggal 20 Juli 2023.
- Andrew Dornbierer (Author). 2021. *Illicit Enrichment : A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth Paperback* - May 27 2021, diakses 29 Januari 2024.
- Asset Forfeiture Policy Manual, Department of Justice. Criminal Division. 2008. Asset Forfeiture and Money Laundering Secsion. Diakses tanggal 20 Juli 2023.

- B. G. M. Widi pradnyana Arjaya, 2016, *Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Penganti terhadap koruptor*, Jurnal Cita hukum, Volume 4 Nomor 1.
- Dynamics of Plea Bargaining in Three Countries, NCJ Number 124467, Journal Criminal Justice Review Volume: 15 Issue: 1 Dated: (Spring 1990) Pages: 48-63. Author(s) M G Gertz, Date Published 1990, diakses tanggal 30 April 2023.
- Eddy O.S. Hiariej. 2013. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jurnal Opinio Juris Vol. 13 Mei-Agustus 2013.
- Edi Nasution. 2013. Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal. http://www.ppatk.go.id/files/pemulihan_aset_asset_recovery_dengan_menyita_aset_ilegal_paper_edinst_10juni20130.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2023.
- Hafid I. 2021. *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*. Jurnal Lex Renaissance 1. No. 6: 470.
- Giersch, Carsten, senior partner in Lexis Nexis. *Poltical Corruption and the Assessment of Politically Exposed Person*, <https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/files/business/white-paper/lexisnexis%20%20political%20corruption%20and%20the%200assessment%20of%20politically%20expo%20pdf.pdf> diakses tanggal 26 Juli 2023.
- Guillermo Jorge. 2007. *The Romanian legal framework on illicit enrichment*. http://apps.americanbar.org/rol/publications/romania-illegal_enrichment_framework-2007-eng.pdf diakses 22 Desember 2021.
- Junior Willem John Latumeten. 2017. *Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Il-licit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi*. Lex Privatum Vol. 5 No. 2.
- Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023 Ensiklopedia of Journal <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Lilik Mulyadi. *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi* www.pnpandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf.
- Lorana Bartels. 2011. Unexplained wealth law in Australia (Bahan yang disampaikan dalam kegiatan studi banding Tim RUU Perampasan Aset Indonesia ke Australia).
- Metode Presentasi, Training of Trainer (TOT) Pendidikan anti korupsi untuk Perguruan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013).
- Muarasultra.com, 13 Oktober 2024, Anggota DPRD Konawe Kepulauan Desa APK beri Tindakan Tegas PT. GKP atas Tindakan Melawan Hukum.
- Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini, 2023, *Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Lex Librum*: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2.

- Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti hal 23.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24).
- Peter Spivack & Sujit Rahman. 2008. *Regulating The New Regulator : Current Trends In Deferred Prosecution Agreements*. American Criminal law Review. Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Romli Atmasasmita. Urgensi RUU Pengembalian Aset, <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakarhukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/> diakses tanggal 30 Maret 2023.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, 2019, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Aset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3.
- Setiawan, Peter J. 2017. *Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum, Argumentum. Vol. 3, No. 2.
- Tromme, Mat. 2019. *Waging war against corruption in developing countries: how asset recovery can be compliant with the Rule of Law*. Duke Journal of Comparative & International Law, v. 29. Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Wahyudi Kumorotomo, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*, <http://www.jimly.com/artikelpakar/linklist?main=4&sub=7>, hlm. 1, lihat juga, <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/03/budaya-upeti-suap-dan-birokrasi-publik.pdf> diakses tanggal 20 Desember 2022.